

DAFTAR PUSTAKA

Alquran

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-qur'an dan Terjemahannya "Qur'an Kemenag". Edisi 2019

Buku

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana, Edisi Pertama, Cetakan Kedua. Jakarta,

Bambang Waluyo, 2002, Jakarta, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika.

Boedi Harsono, 2016. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Penerbit Djambatan, Jakarta.

Budi Untung, 2015. *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, Andi, Yogyakarta.

Chalik dan Marhainis Abdulhay, 1982. *Beberapa Segi Hukum Di Bidang Perkreditan*, Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, Jakarta.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1996. *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers,

Darwin Ginting, 2010, *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis (Hak Menguasai Negara dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia)*, Ghalia Indonesia, Bogor,

Djaja S. Meliala, 2014. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung.

Effendi Peraniangin, 2007. *Hukum Agraria Di Indonesia*, satu telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Rajawali Press, Jakarta,

Franz Magnis Suseno, 2001, Jakarta, *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama.

Habib Adjie, 2000. *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung.

_____. 2018. *(Merelasikan Pembebanan Hak Tanggungan Dengan Eksekusi Hak Tanggungan)* Semarang: Duta Nusindo.

- _____, 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung,
- _____, 2011. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: Refika Aditama,
- Hartono Hadisoeparto, 1984. *Seri Hukum Perdata: Pokok-Pokok Hukum Perdata dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.
- Irma Devita Purnamasari, 2011, Jakarta, *Kiat-Kiat Cerdas, dan Bijak Memahami Hukum Jaminan Perbankan*, Kaifa.
- J. Satrio, 1997. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan : Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. I, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2006, Jakarta, *Hak Tanggungan, Seri Hukum Harta Kekayaan*, Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Jakarta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media.
- Philipus M. Hadjon, 2005. *Penegakan Hukum Adminstrasi*, Penerbit Yurika, Jakarta,
- Purwahid Patrik dan Kashadi, 2008. *Hukum Jaminan, Edisi Revisi dengan UU Hak Tanggungan* , Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
- R. Wirjono Prodjodikoro, 1984. *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, Jakarta.
- Rachmat setiawan, 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan melawan Hukum*, Alumni Bandung, Bandung.
- Remy, Sjahdeni. 1999, Bandung, *Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan Pokok dan Masalah Yang Dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan*, cetakan I, Alumni.
- Riky Rustam, 2017. *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta..

Salim, H.S., 2016. *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

_____, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, (*Hukum Jaminan Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*). Yogyakarta. Liberty Offset.

Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.

Karya Ilmiah

Husni, 2012, Surabaya, "*Hak Tanggungan Dan Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Kreditor*", Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Putra.

Artikel, Jurnal dan Website

Ayu Tamala, 2018. "*Pelaksanaan Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh PPAT di Kabupaten Langkat*", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 2 (2) Mei.

Dwina Natania, dkk, 2020. "*Penyampaian Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Setelah Diberlukannya Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik*", ACTA DIURNAL: Jurnal Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Volume 3, Nomor. 2.

Effendi Perangin, *Praktek Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit*, Rajawali Pers, Jakarta: 1987, hlm. ix dalam Denico Doly, 2011. "*Aspek Hukum Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Roya*", Negara Hukum, Volume 2, Nomor 1.

Jimly Ashiddiqie, "*Keadilan, Kepastian Hukum dan Keteraturan*," <http://www.suarakaryaonline.com>, diakses tanggal 28 Februari 2021.

Mariam Darus Badrulzaman, 2000. "*Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan*", Jurnal Hukum Bisnis, Volume 11.

- Surya Harinata, 2014. “*Akibat Hukum Lewatnya Batas Waktu Kewajiban Mendaftarkan APHT oleh PPAT*”, Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.3 Nomor.2.
- Suriyaman, A., Pide, A. S. M., & Lahae, K. (2021). *Pelepasan Hak atas Tanah Masyarakat Adat Suku Hatam: Tantangan dan Perkembangan Kontemporer*. Al-Azhar Islamic Law Review, Volume 3 Nomor 1, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa.
- Triyono, 2019. “*Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah dan Implikasi Hukumnya Bagi Masyarakat Umum*”, Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, Vol. 17, Nomor. 2
- Wahyu, M., Moein, H. A., Bola, M., & Arisaputra, M. I. (2019). *Penggunaan Instrumen Kontrak dalam Pembangunan Centre Point of Indonesia*. Mulawarman Law Review, Volume 4 Issue 2, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik